

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- A. W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*. (Jakarta: Rajawali, 2006).
- Atmosudirjo, Prajudi., *Administrasi Negara*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1993).
- Hadjon, Philipus M., *Kebutuhan Akan Hukum Administrasi Umum*, dalam Muhami, editor, *Hukum Administrasi dan Good Governance*. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2015).
- Hartini, Sri dan Tendi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia Edisi Kedua*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*. (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).
- Prijodarminto, Soegong, *Sengketa Kepegawaian Sebagai Bagian Dari Sengketa Tata Usaha Negara*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
- Ridwan HR, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2009).
- _____, *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Rosdakarya Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. (Jakarta: Gunung Agung, 2007).

Simanjuntak, Enrico, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Suseno, Frans Magnis, *Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. (Jakarta: Gramedia Utama, 2003).

Tambunan, Toman Sony, *Glosarium Istilah Pemerintahan*. (Jakarta: Kecana, 2016).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

2. Jurnal/Makalah

Adrian E. Rompis, et, al. 2012. “Perbandingan Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Melalui Gugatan Di Peradilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Banding Administrasi Di Badan Pertimbangan Kepegawaian”, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* Vol. 6, No. 1, 2012.

Afifah, Syahrani Mutiara. “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian”, *Serina Untar Prosiding Seri Seminar Nasional (SERINA)*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Andre Prayoga. “Aturan Upaya Banding Administratif Oleh Aparatur Sipil Negara Di Badan Pertimbangan Kepegawaian Dengan Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)* 1, No.4, 2021.

Anggoro, Firna Novi. “Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian ASN Akibat Dijatuhi Hukuman Disiplin”, *Bureaucracy Journal*, Vol. 2, No. 3, 2022.

- Astomo, Putera. “Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia”. *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 1, 2014.
- Devi, Ria Sintah dan Puspita Tarigan. “Peranan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan (Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014)”, *Jurnal Ilmiah Metada*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Habibi, Muhammad Mujtaba. “Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten”. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Vol. 2, No. 2, 2016.
- Hadi, Syofyan dan Tomy Michael. “Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2017.
- Hakim, Arief Rachman. “Perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Badan Pertimbangan Kepegawaian”, *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Harahap, Nurmalita Ayuningtyas. “Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 3, No. 2, 2016.
- Harjanto, Satya Suryo. 2022. “Penyelesaian Sengketa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja melalui Upaya Administratif”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol.9, No. 4, 2022.

- Khair, H. Abdul. "Penyelesaian Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Melalui Banding Administratif", *JATISWARA Jurnal Ilmi Hukum* 31, No. 3, 2016
- Kurniawan, Farid Wahyu dan Beni Hidayat. "Upaya Hukum Banding Administratif Pasca Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Aparatur Sipil Negara", *Media of Law and ShariaI*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Marbun, Robinsar. "Transformasi Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017.
- Nurmalita Ayuningtyas Harahap. "Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara". *Jurnal Yuridis* Vol. 3, No. 2, 2016.
- Prayoga, Andre. "Aturan Upaya Banding Administratif Oleh Aparatur Sipil Negara Di Badan Pertimbangan Kepegawaian Dengan Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, Vol. 1, No. 4, Desember 2021.
- Putrijanti, Aju dan Lapon Tukan Leonard. "Kompetensi Peratun Untuk Memeriksa Unsur Penyalahgunaan Wewenang", *Jurnal IUS*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Riza, Dola. "Hakikat KTUN Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", *Soumatara Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2019.

Riza, Dola. “Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Rurugala, Yeremia Pierre, dkk. “Tinjauan Hukum Banding Administrasi Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara”, *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 3, 2023.

Safitri, Erma dan Nabiatus Sa’adah. “Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2021.

Simanjuntak, Enrico. “Perkembangan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Mengadili Sengketa Kepegawaian Aparatur Sipil Negara”, *Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara*, Vol. 4, No. 1, 2021.

Sodiq, Mochamad Muslich Haji. “Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2021.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Pengadilan,

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian..

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 35).

4. Skripsi/Tesis

Andre Prayoga. *Skripsi : Prosedur Upaya Banding Administratif Oleh Aparatur Sipil Negara Di Badan Pertimbangan Kepegawaian*

Dengan Peradilan Tata Usaha Negara. Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, 2020.

Hidayat, Tufik. *Skripsi : Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Rehabilitasi Bidang Kepegawaian Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus: Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.SMG)*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2022.

Sasmita, Ajeng Risnawati dan Dwi Haryati. *Tesis : Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Melalui Upaya Banding Administratif Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Badan Pertimbangan Kepegawaian*. Universitas Gadjah Mada, 2017.